



SOSIALISASI DAN SEMINAR EITI

“PERBAIKAN TATA KELOLA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA”

**Oleh : Direktur Pembinaan Program Minerba
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM**

Denpasar, 25 Agustus 2-16

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

II. ARAH KEBIJAKAN

III. PERBAIKAN TATA KELOLA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

IV. MINERBA ONE MAP INDONESIA (MOMI)

PENDAHULUAN

DASAR PEMIKIRAN

- ❖ UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 mengamanatkan bahwa sumber daya alam yang terdapat di bumi Indonesia harus **dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat**.
- ❖ Sumber daya alam Indonesia, khususnya mineral dan batubara, **cukup berlimpah namun terbatas** (tidak terbarukan), sehingga kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan nasional.

ARAH KEBIJAKAN

RUMAH KEDAULATAN ENERGI

Membangun Kedaulatan Energi Dan Sumber Daya Mineral



Akses



Ketersediaan



Kemampuan



Daya saing

Menangani Krisis

1. Subsidi BBM
2. Efisiensi pasokan
3. Keputusan penting yang tertunda
4. Kick off Program 35.000MW
5. Konsolidasi Organisasi
6. Stakeholder Manajemen

9 Program Strategis

1. Perbaikan bauran energi → 25% @2025
2. Pembudayaan Konservasi Energi
3. Eksplorasi migas secara agresif
4. Peningkatan produksi dan *lifting* migas
5. Pembangunan infrastruktur migas
6. Pembangunan pembangkit 35.000 MW
7. Pembangunan industri penunjang sektor energi
8. Hilirisasi industri mineral dan batubara
9. Konsolidasi industri tambang

Sinergi & Penguatan Kelembagaan

1. Penguatan KESDM
2. Perbaikan regulasi
3. Sinergi BUMN sektor energi
4. Transformasi PLN dan Pertamina
5. Kerjasama Pemerintah-Swasta
6. Kerjasama Internasional

Kepemimpinan & sumber daya manusia: Peningkatan kepemimpinan dan profesionalitas SDM
National Capacity Building: With teknologi, keterlibatan industri nasional, informasi
Tata kelola: Transparansi, akuntabilitas, *fairness* dan independensi

Sinkronisasi Pusat
dan Daerah

Perbaikan Tata
Kelola Perizinan

Peningkatan Nilai
Tambah Minerba

Renegosiasi Kontrak
KK dan PKP2B

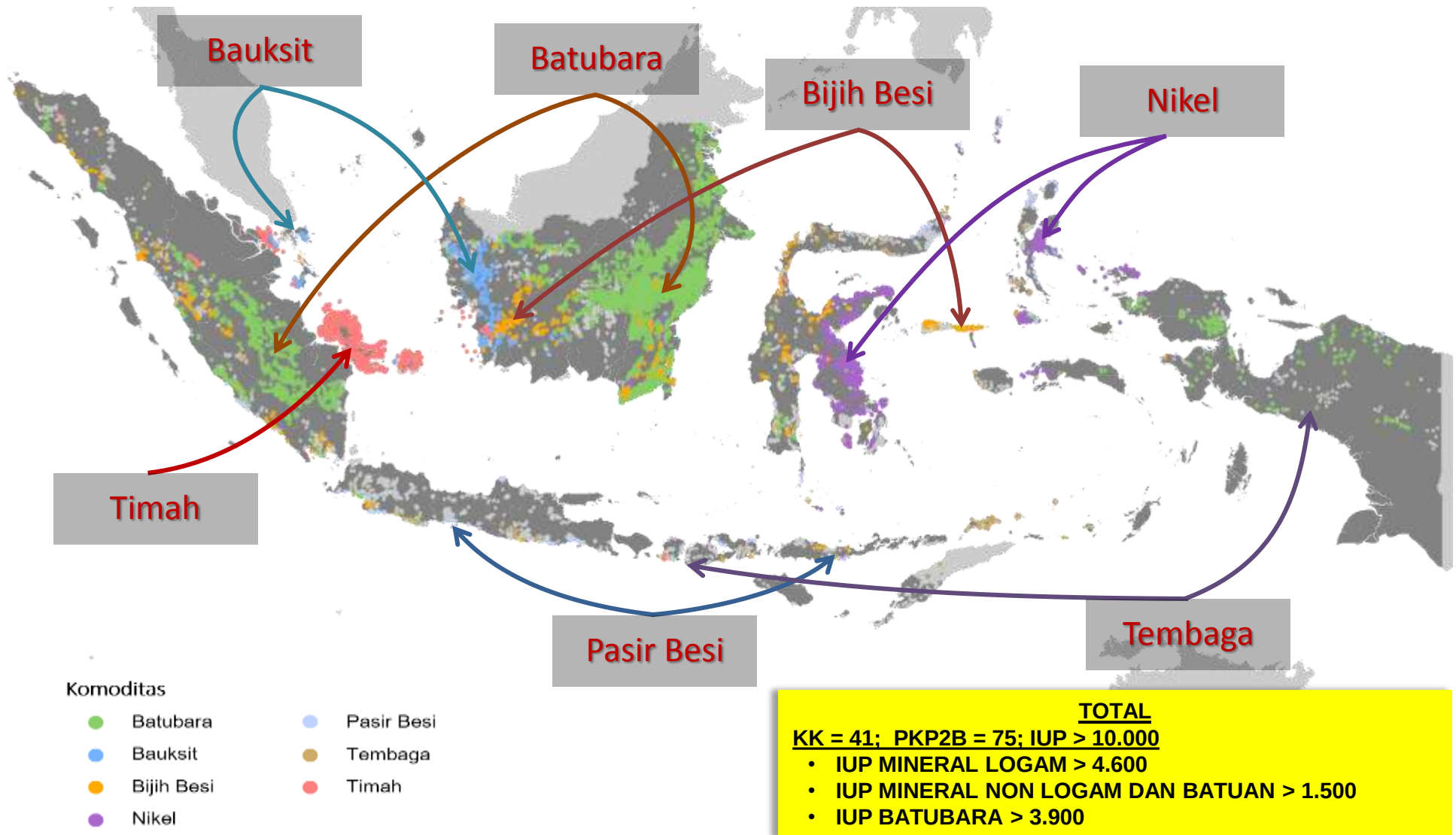
Optimalisasi
Penerimaan Negara

ARAH KEBIJAKAN

- 
- 1 **Memprioritaskan** mineral dan batubara untuk **pemenuhan kebutuhan dalam negeri**
 - 2 Menciptakan kondisi usaha pertambangan minerba yang **transparan** dan **menjamin kepastian hukum**
 - 3 Melakukan **pembinaan dan pengawasan** berkaitan dengan penyelenggaraan pertambangan
 - 4 Meningkatkan **investasi** dan **penerimaan negara**
 - 5 Meningkatkan **nilai tambah minerba, penggunaan industri dan tenaga kerja nasional, serta CSR.**
 - 6 **Memelihara lingkungan di semua tahapan** kegiatan pertambangan mulai dari eksplorasi, operasi produksi dan pengolahan/ pemurnian melalui reklamasi dan pasca tambang

PERBAIKAN TATA KELOLA

SEBARAN KEGIATAN PENGUSAHAAN MINERBA



PENYEDERHANAAN PERIZINAN (1)

218

PERIZINAN



< 2014

Dipangkas **60%** dalam 6 Bulan

89

PERIZINAN



MULAI 2015

26

PERIZINAN



SAAT INI

(Akan terus dirampingkan)

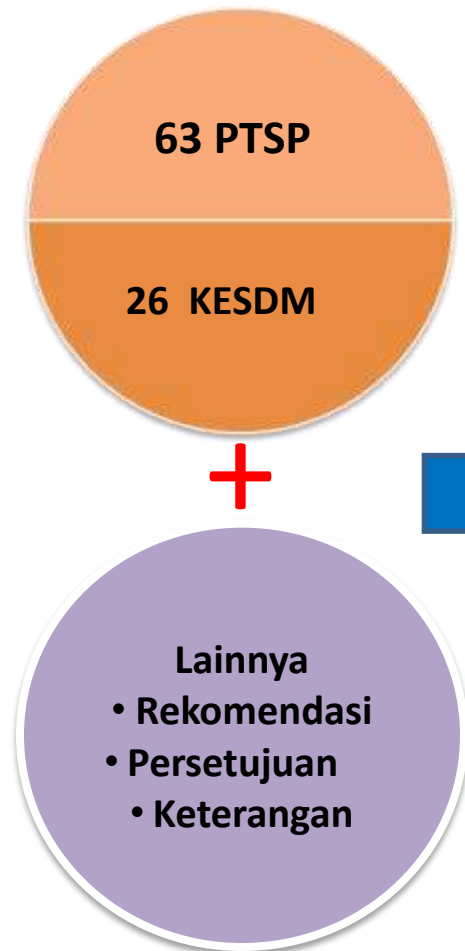
NO.	BIDANG	SEBELUM	SESUDAH	KE PTSP
1	KELISTRIKAN	52	29	10
2	MIGAS	104	42	42
3	MINERBA	62	18	11
TOTAL		218	89	63

63 PERIZINAN

dilimpahkan ke PTSP

PENYEDERHANAAN PERIZINAN (2)

Perizinan Saat Ini



Rencana Kedepan

"10"

P
E
R
I
Z
I
N
A
N

1. Ijin Usaha Hulu Migas
2. Ijin Usaha Hilir Migas
3. Ijin Usaha Penunjang Migas

4. Ijin Usaha Hulu Minerba
5. Ijin Usaha Hilir Minerba
6. Ijin Usaha Penunjang Minerba

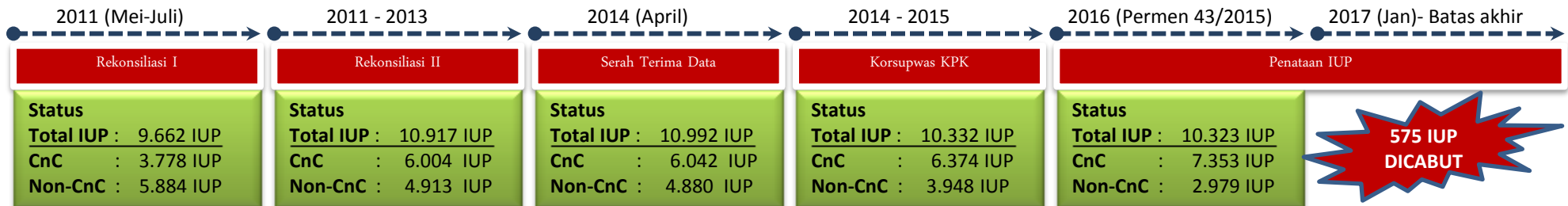
7. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
8. Ijin Usaha Transmisi dan Distribusi Kelistrikan
9. Ijin Usaha Penunjang Kelistrikan

10. Ijin Usaha Konservasi Energi

PENATAAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Ijin Usaha Pertambangan Clean and Clear (IUP CnC)

1. Wilayah IUP **TIDAK TUMPANG TINDIH** dengan Wilayah IUP lainnya untuk komoditas sejenis
2. Persyaratan administrasi lengkap dan benar (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).



Keterangan :

1. **Korsupwas KPK Feb-Nov 2014 (12 Provinsi) :** Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan
2. **Korsupwas KPK Mar-Okt 2015 (19 Provinsi) :** Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Maluku, Papua, Papua Barat, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, NTT, NTB, Sulut, Sulbar dan Gorontalo

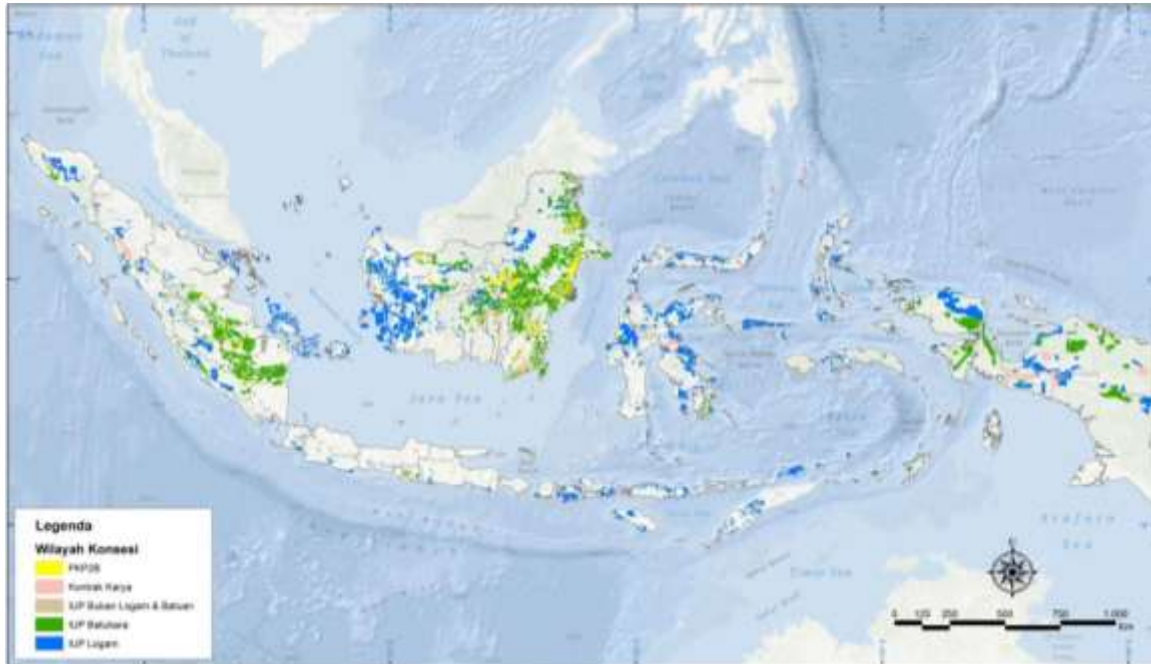
Tindak lanjut (Ags 2016 - Jan 2017) :

- **Sinkronisasi data** dengan Dinas ESDM Provinsi
- **Rekonsiliasi data** bersama KPK dan Pemda Provinsi (3 lokasi)
- **Verifikasi** rekomendasi dari Provinsi
- **Pengumuman** IUP CnC dan IUP dicabut (min 1x per bulan)
- **Pengumuman** (melalui Website dan Surat Edaran) agar Pemegang IUP melakukan registrasi dan menyerahkan dokumen pendukungnya ke Pemda dan KESDM (sesuai kewenangan).

PERBAIKAN TATA KELOLA PNBP

1. **Perbaikan SOP** tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBP
2. **Sosialisasi** pelaksanaan pembayaran PNBP melalui SIMPONI Per tanggal 1 Januari 2016.
3. **Kewajiban pembayaran/penyetoran PNBP secara elektronik** paling lambat 1 Nopember 2015 (surat Dirjen Minerba No. 1470/30/DJB/2015 tanggal 24 Agustus 2015).
4. **Intensifikasi penagihan** kewajiban PNBP (bersama Pemda)
5. **Percepatan penagihan piutang** (post-audit)
6. **Menyerahkan penagihan** Piutang Perusahaan yang tidak memenuhi kepada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL).
7. **Penguatan kelembagaan** (pembentukan Direktorat Penerimaan Minerba)
8. **Perbaikan administrasi PNBP** (sistem informasi Minerba terpadu)

KOLABORASI ANTAR K/L



Status

Total IUP : 10.323 IUP
CnC : 7.353 IUP
Non-CnC : 2.979 IUP

575 IUP
DICABUT

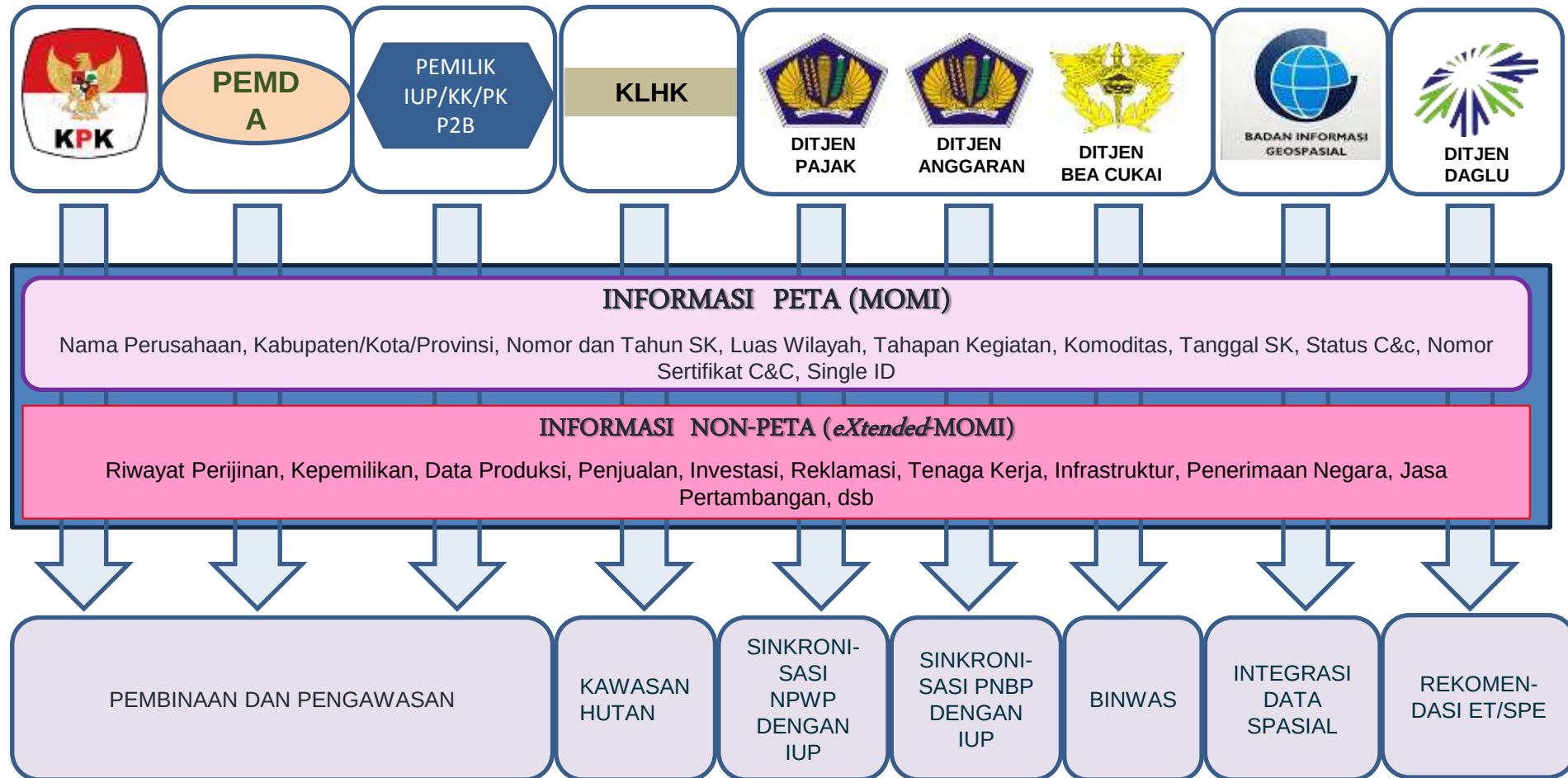
- Bersama KPK meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka **penyelesaian IUP Non CNC**
- Bersama BPK, BPKP, Kementerian Keuangan serta berkoordinasi dengan wajib bayar (pemegang IUP, KK dan PKP2B) melakukan **intensifikasi penyelesaian piutang** negara dan **optimalisasi serta tertib tata kelola PNBP** sektor Minerba
- Bersama Kementerian Kehutanan serta berkoordinasi dengan pemegang IUP, KK, dan PKP2B melakukan **penyelesaian masalah tumpang tindih lahan** pertambangan dengan wilayah hutan konservasi
- **Penataan regulasi** a.l tentang pelabuhan khusus, *witness surveyor*, tata cara pembayaran PNBP, mekanisme perizinan, tata cara pelaporan kegiatan

MOMI DAN *NEXT PROJECT*

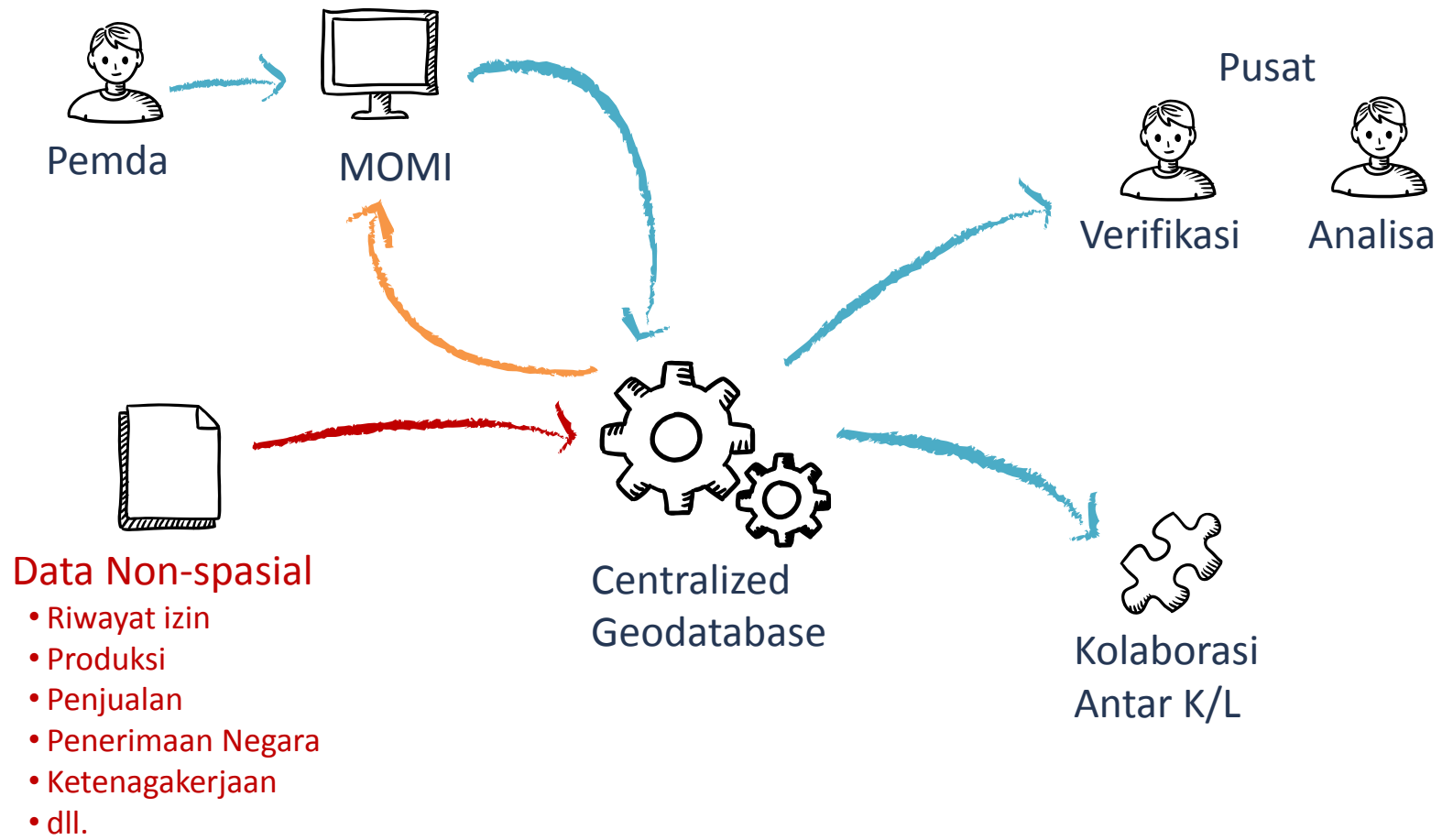
Minerba One Map Indonesia (MOMI)

- ☑ **Minerba One Map Indonesia (MOMI)** -- Sistem Informasi Wilayah Pertambangan berbasis teknologi Web GIS.
- ☑ Basis data seluruh wilayah pertambangan yang ada di Indonesia
- ☑ Mengintegrasikan data dari sub sektor/sektor lain.
- ☑ Single interface.
- ☑ Dapat **diakses** dari **manapun** dan **kapanpun** di seluruh dunia.
- ☑ Subsistem pendukung kebijakan "*one map policy*" Indonesia.

Integrated Minerba Information Systems (IMIS)



Integrated Minerba Information Systems (IMIS)



LIVE DEMO MOMI



Terima Kasih

www.minerba.esdm.go.id